

## **ANALISIS KEBIJAKAN DALAM RESPONSIF KESETARAAN GENDER DI KOTA MAKASSAR**

### *POLICY ANALYSIS RESPONSIVE TO GENDER EQUALITY IN MAKASSAR CITY*

**Roslianah**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan  
Email: roslianahochi4@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana kebijakan Publik merespon kepentingan untuk kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sementara sumber data adalah kelompok masyarakat tertentu, dengan menganalisis keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, display data dan verifikasi data. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan PUG yang dilakukan melalui pembinaan Instansi terkait dan telah memperlihatkan adanya kemajuan, walaupun belum berjalan maksimal. Sementara dalam relasi sosial yang termanifestasikan dalam kehidupan ekonomi, politik dan tatanan hukum serta nilai-nilai hak asasi manusia, Penelitian ini telah melihat bagaimana geliat perempuan dalam berbagai hal. beberapa komponen IPM sebagaimana dijadikan tolok ukur, khususnya dalam keberdayaan perempuan ternyata hasil penelitian menunjukkan peningkatan, terutama peran perempuan dalam politik yang dapat mempengaruhi peran perempuan dalam sector lainnya. Namun dengan beberapa peningkatan itu, masih diperlukan komitmen dan konsistensi pemerintah terutama dalam ketersediaan anggaran serta sejauhmana mengkomunikasikan secara meluas program strategis itu yang tampaknya belum berjalan sebagaimana mestinya.

**Kata kunci:** Strategi kebijakan, Pengarusutamaan Gender, dan IPM.

#### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine the extent to which public policy responds to interests in gender equality. The research method used is a qualitative method, while the data source is a certain community group, by analyzing women's involvement in various aspects. Data was analyzed using qualitative analysis, namely data reduction, data display and data verification. The results of the research show that PUG development carried out through related department guidance has shown progress, although it has not run optimally. Meanwhile, in social relations which are manifested in economic life, politics and legal order as well as human rights values, we see how women are active in various things. Several HDI components are used as benchmarks, especially in women's empowerment, research results show an increase, especially the role of women in parliament which influences the role of women in other sectors. However, with these improvements, government commitment and consistency is needed, especially in budget availability and the extent to which strategic programs are communicated, which do not appear to be running as they should.*

**Keywords:** Policy strategy, Gender Mainstreaming, and HDI

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula penjelasan dalam Undang-Undang No.21 tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. 111 *Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation* (Konvensi Ilo Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan), disebutkan Salah satu bentuk hak asasi adalah persamaan kesempatan, dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Karena diskriminasi itu adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Rahayu, *Journal Legislasi Indonesia*, 2012). Apa yang dikemukakan diatas tidak terlepas dari pemahaman tentang Gender. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis (Arbain, dkk, *Jurnal Sawwa* Volume 11 Nomor 1, Oktober 2015) Perbedaan itu terlihat pada pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat, maka apa yang disebutkan itu tentu Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah Sesuatu yang ditakdirkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolaknya. Manusia adalah merupakan totalitas (kesatuan), sehingga akan didapat hubungan yang erat antara perkembangan fisik, motoric, mental, emosi dan social. Perhatian yang berlebihan terhadap satu segi akan mempengaruhi segi lain (Gunarsa, 4: 2011). Sementara itu, kodrat sifatnya bersifat

universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Kehadiran perempuan mendampingi lelaki menjadikan hidup semakin berarti karena yang memiliki istri dan anak akan lbih takut menghadapi kematian ketimbang jejak. Perempuan lah menjadikan kita lebih menghargai hidup (Shihab: 2011) Perbedaan laki-laki dan perempuan hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan yang berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam konteks kebijakan untuk perencanaan pembangunan di daerah, hal itu telah termaktud dalam Rencana Pembangunan jangka menengah nasional maupun dalam RPJMD, sebagaimana diatur dalam RPJMN (2019-2024), disebutkan tentang arah dan strategi pembangunan jangka menengah adalah Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup: (a) penguatan kebijakan dan regulasi, (b) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), (c) peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha; d) peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan; dan e) peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Namun

dibalik itu masih tercatat beberapa tantangan yang dirasakan antara lain disebutkan dalam dokumen RPJMN tsb. bahwa Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif.

Karena itu Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG) kiranya masih perlu dipacu lebih kencang . Inequality Index Indonesia berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur dan merupakan negara ketiga terendah di ASEAN. Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan pekerja pada 2022 mencapai 52,74 juta pekerja di Indonesia. Jumlah pekerja perempuan itu setara dengan 38,98% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya dalam dokumen itu memberi petunjuk dan arah tentang diperlukannya suatu usaha dan komitmen yakni dalam menghadapi berbagai tantangan, diantaranya perlu penerapan kebijakan, piranti analisis, serta komitmen dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender yang masih belum optimal, dengan demikian perlu mendorong kewenangan berdasar legitimasi sosiologis, tidak sekedar mengandalkan legitimasi kekuasaan (Kumorotomo, 51: 2011) . pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di ditingkat kota, masih rendah dan belum seragam, serta kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PUG, terutama SDM serta penyediaan dan pemanfaatan data gender di dalam setiap tahapan pembangunan yang masih belum memadai. Lalu bagaimana kebijakan pada tingkat Pemerintah di daerah, dalam hal ini khususnya pemerintah kota Makassar. Berbagai piranti peraturan perundang-undangan telah dibuat dalam mendukung strategi menuju akuntabilitas pemerintah kota, antara lain: dimulai dari Instruksi Presiden No.19 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2019. Tentang Pedoman Pengarusutamaan

Gender Dalam Pembangunan Daerah. Terkait dengan itu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No.5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. dinyatakan pada salah satu point utama bahwa target yang ingin dicapai adalah: Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Mencapai Target di Kota Makassar pada point ini dinyatakan menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Inilah peluang dan tantangan yang ada, dan tentu memerlukan kajian dan strategi yang lebih matang.

Kebijakan publik kiranya penting untuk melakukan pendekatan- pendekatan teoritik dalam mempelajari berbagai perilaku dari kesatuan sistem politik agar dapat mengkaji dan memberikan sumbangsih dalam mengarahkan perhatian untuk mewujudkan kesetaraan gender, atau setidaknya ada sejumlah kebijakan yang memberikan aksesibilitas dalam menampakkan *strong political will* dalam melawan kondisi yang sudah terlanjur disebut sebagai adanya *Cultural institutionalized*. Dalam hal ini perlu suatu proses analisis kebijakan publik dengan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politik (Subarsono, 8: 2011). Oleh karena itu salah satu pendekatan yang dipandang dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan adalah pendekatan kelembagaan, karena dipandang yang lebih luas dan bersifat deskriptif yang dapat menjelaskan hubungan kausalitas antara aturan-aturan lembaga dengan substansi kebijakan publik (Budi winarno, 57; 2012). Tujuan penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah kota Makassar yang telah dilakukan dan seberapa besar merespon terhadap Indeks pembangunan manusia (HDI), khususnya kaum perempuan yang dapat dibandingkan dengan kemajuan yang dirasakan oleh kaum laki-laki sebagai *compare* dalam

melihat Pengarusutamaan kesetaraan gender yang menjadi topik dalam pembahasan ini.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (*Qualitative Research*) yang merupakan penelitian dimana peneliti adalah “*Key Instrumen*” utama, atau dapat pula dengan bantuan orang lain. Dalam menganalisis data atau informasi peneliti juga akan melakukan cros chek kebenarannya sebagai mana ada tiga cara dalam rangka triangulasi data yakni *Time* (waktu), *Person* (orang) dan *Place* (tempat). semuanya akan terlihat apakah jawaban atas subyek akan berbeda atau sama. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji berbagai literature kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Disamping itu, juga dilakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait. baik peraturan yang sifatnya mencakup tingkat nasional maupun peraturan lingkup wilayah tingkat Kota sehingga keduanya dapat dilihat dan dibandingkan untuk mendapatkan kajian yang lebih dalam lagi. Selain itu berbagai tulisan, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan kajian ini, juga menjadi sumber dalam mengelaborasi lebih dalam terhadap tulisan ini. Untuk kesempurnaan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan baik pada tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun pada stakeholders serta kepada masyarakat yang secara fungsional memiliki tugas yang langsung kepada subyek kajian, seperti Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Makassar, maupun terhadap pegawai pada Dinas perencanaan pembangunan Daerah Kota Makassar sampai pada tingkat ORW.

Penelitian berada pada Lingkup Pemerintah Kota Makasaar, lebih khusus lagi secara structural, tugas ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam konteks penelitian ini terdapat

kelompok masyarakat tertentu yang menyumbang data yang sangat mendasar, terutama sumber sumber yang perlu dikaji yakni lingkup operasional terkait pola pembinaan “*Shelter* warga” di Kota Makassar yang dianggap sebagai inovasi pemerintah kota terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemahaman Responsive Gender sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008, adalah suatu keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan perbedaan tersebut. Maka berdasarkan hasil penelitian, maka dapat digambarkan masih terdapat perbedaan yang jauh dan memerlukan komitmen untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk = 1.423.877 terdiri laki-laki sebanyak 709.060 orang, sedangkan perempuan berjumlah 714.817 orang (sensus penduduk tahun 2020), artinya jumlah perempuan masih lebih banyak dibanding dengan laki-laki, Hal ini berbeda dengan pada umumnya hasil sensus di wilayah lainnya di Indonesia yang secara nasional menempatkan laki-laki dalam jumlah yang lebih banyak. Karena itu dalam analisis kebijakan public tidak terlepas dari konsep sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tingkat kota, tentu sebagai salah satu tolok ukur yang dapat digunakan, dilain pihak responsive gender telah memperlihatkan kontraproduktif dengan ketimpangan-ketimpangan gender yang terjadi di lingkungan kita. khususnya dalam wilayah Tingkat Kota Makassar. Berdasarkan indicator diatas, lalu di analisa, dan setelah mengelaborasi kajian yang lebih

dalam, diketahui hal-hal yang membuktikan masih adanya ketimpangan-ketimpangan dalam responsive gender, walaupun juga ada beberapa segi kemajuan yang dapat dicatat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut .

Oleh karena itu dalam penelitian ini, kiranya untuk mengukur Indeks pembangunan manusia sebagaimana dijelaskan diatas maka terdapat sebuah metodologi yang diperkenalkan oleh UNDP 2010, Adapun IPM yang dimaksud dibagi atas komponen-komponen yang meliputi:

### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan

Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010

Dimensi	Indikator	
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	IPG/ GDI
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan 2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

### 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	IDG/GEM
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Sumber: <https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>

Berdasarkan metode yang dikemukakan diatas, maka kajian dalam analisis indeks pembangunan gender untuk tingkat Kota Makassar berkenaan dengan Responsive gender yang dapat disajikan sebagai berikut.

### 1. Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Penggunaan indikator pada IPG pada hakikatnya berawal dengan IPM. Dalam analisa penjelasannya bahwa pada indikator angka harapan lama sekolah yang mengukur input dari dimensi pengetahuan, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas, sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia 25 tahun ke atas. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder, kecuali pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan. Tercatat IPG Secara nasional, di tahun 2019, terdapat 11 provinsi yang telah mencapai target di atas 92,00, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku,

Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah. Adapun untuk mengetahui IPG (Indeks Pembangunan Gender) diformulasikan sebagai rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Nilai IPG yang tinggi bisa didapatkan dari daerah dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan yang “sama-sama tinggi” dan “sama-sama rendah” Adapun IPG Kota Makassar tahun 2019 tercatat 94,48 (Muzayyanah, 2020). Sedangkan data yang dirilis oleh (BPS: 2023, diakses september 2023) yang mencatat capaian target IPM tahun 2022 yang lebih rendah yakni IPM Sulawesi Selatan, laki-laki 76,72 dan IPM perempuan 71,46, akan tetapi secara khusus di kota Makassar ternyata memiliki angka diatas rata-rata IPM propinsi sulsel sendiri yakni IPM perempuan 80,68.

**Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar tahun 2021-2022**

<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kota Makassar</b>			
Laki-laki		Perempuan	
2021	2022	2021	2022
84,93	85,36	80,21	80,68

Sumber: BPS, 2023, diakses September 2023

Capaian IPG sangat fluktuatif, bisa terjadi penurunan atau peningkatan sehingga bisa mengalami perbedaan, tentu saja dengan pengaruh berbagai ketimpangan yang bisa terjadi antara lain karena pembangunan belum mempertimbangkan gender, praktek budaya yang belum berpihak pada kesetaraan gender (Muzayyanah, 2020). adapun angka indeks ketimpangan gender di Kota Makassar dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

**Indeks Ketimpangan Gender 2021-2022**

<b>Indeks Ketimpangan Gender di Kota Makassar Tahun</b>	
2021	2022
0,198	0,188

Sumber: BPS 2023 diakses september 2023

Selain itu ketimpangan juga bisa terjadi akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam pemerintahan. (Gusmansyah: Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019). Dengan berbagai rintangan, dan ketimpangan yang terjadi, ternyata pada tahun 2022, Di Kota Makassar ada penurunan ketimpangan dibanding tahun 2021. Penurunan ketimpangan antara laki dan perempuan menunjukkan ada perkembangan yang lebih baik. Penelitian ini melihat ada keterkaitan dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dengan secara massif mengaktifkan lembaga Shelter warga di beberapa Kelurahan dengan uraian tugas memberikan bantuan kepada Perempuan yang mengalami masalah dan anak yang membutuhkan bantuan, demikian juga keterwakilan perempuan diparlemen 2019-2024 yang meningkat dari priode sebelumnya. Adapun keberhasilan dalam kebijakan Pemerintah Kota, antara lain disebutkan dalam dokumen RPJMD Kota Makassar tercatat sejumlah kekerasan dalam rumah tangga ditangani dengan baik, dengan perincian Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kota Makassar tahun 2016 adalah 3,43 yang berarti bahwa KDRT rata-rata terjadi pada 3 rumah tangga di Makassar dari 100 rumah tangga. Dan Pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,32 dengan jumlah kasus 1.031. jumlah rumah tangga di Makassar tahun 2020 = 358.054. penjelasan ini artinya mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan semakin tinggi. Berbagai bentuk Kekerasan dalam rumah tangga selain kekerasan fisik, juga terjadi kekerasan Psikis (Kejiwaan), kekerasan seksual sampai kepada penelantaran rumah

tangga. Adapun penelantaran rumah tangga artinya tindakan meninggalkan tanggungjawab untuk memberikan kehidupan, merawat atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. (Kemenag RI: 127: 2017).

Adanya keberhasilan dalam menangani KDRT ini merupakan dampak dari kerja pencegahan yang dilakukan oleh “shelter warga” yang dimulai pada tahun 2016 dengan dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Makassar melalui kegiatan sosialisasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan, sebagaimana disebutkan bahwa tujuan dari Shelter warga adalah mensejahterakan perempuan dan anak dalam mewujudkan anak Indonesia Sehat, berpendidikan, berakhlak mulia dan kepastian hukum dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi bagi perempuan dan anak (Ita Purmalasari; Jurnal of criminal Low, 2021), selain itu dalam hal ini termasuk kegiatan sosialisasi mengurangi dampak pada dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan. walaupun sosialisasi ini belum berjalan merata pada warga, seperti dinyatakan oleh ketua ORW 10 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar (tidak mau disebut namanya). Bahwa: “Sosialisasi Shelter warga belum menyentuh sampai ditingkat RW, mungkin karena disini dianggap masih aman-aman saja. Saya sendiri belum memahami arti dari shelter, saya perlu buka google untuk mengetahui apa itu shelter”.

Itulah gambaran Shelter warga yang sebenarnya belum merata diketahui oleh warga, meskipun diakui memiliki mamfaat untuk mensejahterakan perempuan dan anak. Selanjutnya mari melihat Indeks pembangunan gender di Kota Makassar. Walaupun dengan beberapa ketimpangan, tidak dapat disangkal ada beberapa kemajuan dalam akuntabilitas Indeks pembangunan Gender di Kota Makassar.

### a. Dimensi Angka Harapan Hidup

Salah satu tolok ukur dalam Indeks Pembangunan Gender adalah angka harapan hidup. ini adalah salah satu ukuran melihat tingkat kesehatan. Sehat adalah suatu keadaan diri seseorang yang jasmanai dan rohani/ jiwanya bebas dari penyakit sehingga mampu memproduksi secara sosial dan atau ekonomis (Thabrani, 20: 2015). Dalam data kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sampai tahun 2019 angka harapan hidup sedikit meningkat dari tahun ketahun dan ternyata perempuan memiliki angka harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki. Tahun 2019, Pada rata-rata skala nasional, AHH perempuan adalah 73,13 tahun, sedangkan laki-laki adalah 69,44 tahun. Hal ini berarti perempuan hidup 3,89 tahun lebih lama dibandingkan laki-laki (Muzayyadah, 2020). Kondisi secara umum terjadi juga pada penduduk skala tingkat Kota Makassar. sebuah penelitian tahun 2013 menyebutkan “ usia harapan hidup di Kota Makassar sudah mencapai 74 tahun. Padahal usia harapan hidup nasional hanya mencapai 70,7 tahun (Suriastini, dkk : 2013). Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian (Muzayyadah) sebagaimana tersebut diatas. Sedangkan angka harapan hidup tahun 2022 menurut BPS (diakses septembar 2023, dapat dilihat pada daftar di bawah ini.

#### Angka Harapan hidup penduduk Kota Makassar

Angka Harapan Hidup (TH) penduduk Tingkat Kota Makassar				
	Laki-laki		Perempuan	
2021	2022	2021	2022	
70.17	70,40	73.99	74.27	

Sumber: BPS-2023 diakses September 2023.

Menurut penelitian, Angka harapan hidup perempuan dipengaruhi oleh faktor genetic atau *female advantages* yang terkait cromoson perempuan memiliki sistim imun yang lebih tahan dan prilaku perempuan dinilai

lebih sehat (Muzayyadah , 2020). hal yang sama juga dikemukakan Nain (Jurnal Pallangga Vol.3. 2021), dengan melihat terdapat perilaku sehat Ibu dan anak dalam keluarga melalui kebiasaan makan, minum yang sehat dan bergizi serta perilaku hidup bersih, tentu hal ini dapat mendorong angka harapan hidup ibu dan anak yang lebih lama.

### b. Dimensi Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat diukur dari dua hal yakni harapan Lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS)/ *Expected years of schooling* (EYS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Ternyata secara nasional perempuan memiliki peluang harapan sekolah yang lebih lama. Angka partisipasi sekolah laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan dan kondisi ini terjadi di perkotaan dan perdesaan.

Pada Tingkat Kota Makassar, Perempuan ternyata juga memiliki harapan lama sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki sebagaimana berlaku pada tingkat nasional.

#### Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama sekolah (Tahun) pada wilayah Kota Makassar			
Laki-laki		Perempuan	
2021	2022	2021	2022
15.54	15.55	16.08	16.09

Sumber: BPS-2023, diakses September 2023

### c. Indeks Kelayakan hidup

Indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan Human Development Index (HDI) di bidang ekonomi

menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita. Berdasarkan data yang dirilis BPS-2023, angka pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Angka pengeluaran ini dapat dikaitkan dengan indeks kelayakan hidup. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut

Pengeluaran rata rata per kapita Kota Makassar yang disesuaikan menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			
Laki-laki		Perempuan	
2021	2022	2021	2022
20.575	20.964	13.636	13.862

Sumber : BPS-2023 diakses September 2023

### 1. Angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG ).

Arti konsep pemberdayaan disebutkan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai-nilai social. (Sugandi, 2011) Karena itu Dalam mengukur Indeks pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan. perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan (Muzayyanah, 2020). Terdapat tiga komponen yang dijadikan tolok ukur keberdayaan perempuan ,yakni meliputi keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan Sumbangan pendapatan perempuan. Berikut beberapa data menyangkut pemberdayaantidak selalu disalahkan karena perempuan lemah atau tidak mampu, tentu saja hal itu akibat dari konstruksi sosial patriarkis yang terbentuk dari berbagai cara pandang, sejarah,



ideologi, dan budaya yang telah dijalankan selama turun temurun yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Konstruksi sosial ini juga telah menciptakan berbagai kebiasaan, pola perilaku, kebijakan, dan cara pandang menjadi tidak adil atau bias gender. Dengan jumlah perempuan yang mengisi hampir setengah dari total populasi, situasi ini tentunya akan berdampak pada tingkat kualitas hidup SDM Indonesia secara keseluruhan. Persoalannya kemudian adalah seperti apakah yang mempengaruhi sebuah keputusan. Menurut Winarno (37: 2012), ada nilai-nilai yang mengarahkan perilaku para pembuat keputusan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai politik, Nilai-nilai organisasi, Nilai pribadi, nilai kebijakan dan nilai ideologi. Sedangkan tolok ukur yang digunakan dalam mengukur keterlibatan perempuan terkait IDG adalah dengan melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. (Muzayyanah, 2020). maka apa yang disebutkan dalam indikator pemberdayaan Gender di atas, Sejauhmana proporsi yang dimiliki perempuan sebagai seorang manajer, profesional dalam jabatan yang dimiliki berbanding antara laki laki dan perempuan. Sejalan dengan itu, data yang dirilis oleh (BPS-2023), bahwa perempuan yang menduduki tenaga profesional di Kota Makassar telah meningkat dari tahun sebelumnya 2021 yang hanya 44,30%, kemudian pada tahun 2022 menjadi 45,76% .artinya keberdayaan profesional perempuan di Kota Makassar semakin meningkat.

### **C. Distribusi/Sumbangan Pendapatan Gender**

Menurut catatan dalam Mulawarman, (2022) Sumbangan pendapatan perempuan pada berbagai kegiatan terutama anggota parlemen perempuan di Kota Makassar banyak sekali sumbangan dan bantuan yang diberikan

seiring dengan semakin banyaknya perempuan masuk diparlemen. Hal itu tidak terlepas dari sistim pemilihan umum yang juga memberikan peluang perempuan untuk masuk sebagai anggota parlemen. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom. Seperti halnya “Fatma Wahyudin” seorang anggota DPRD Kota Makassar dalam setiap kunjungan reses selalu merespon keluhan terkait berbagai masalah seperti insentif guru ngaji, pemandi jenazah, imam, infrastruktur dan bansos, jalan rusak. dll (Mulawarman, 2022) secara umum Sumbangan pendapatan perempuan di Kota Makassar menurut data BPS: Tahun 2023, diakses bulan September 2023, ternyata sumbangan pendapatan Gender pada tahun 2022 mencapai 35,53%, sedangkan tahun sebelumnya (tahun 2021) mencapai 35,51%, artinya ada kenaikan 0,02%.

### **2. Merancang Kebijakan Untuk Mendukung Strategi Menuju Akuntabilitas Pemerintah Kota**

Dalam kerangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana target-target yang ingin dicapai dalam RPJMD yang telah tersusun dengan baik, maka perhatian pemerintah hendaknya tidak mengabaikan Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kancah politik, hal itu sangat penting karena akan memberi peluang dipertimbangkannya suara, kepentingan, dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Aspirasi, pikiran dan pertimbangan perempuan dapat terwakili dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan menjadi peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender. Urgensi keterwakilan perempuan di kancah politik pada akhirnya berdampak pada akses, peluang, kesempatan, partisipasi, perlindungan

dan penikmatan manfaat pembangunan yang adil dan merata. Maka sejalan apa yang dikemukakan (Mansour faqih, 2008) bahwa Tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asuransi, ideologi, dan praktek hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. Tanpa adanya kontribusi perempuan di bidang politik, maka proses-proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik lebih sulit dicapai karena pengalaman dan kebutuhan perempuan lebih mudah disuarakan dan diperjuangkan oleh wakil dari perempuan. Dengan demikian,

1. Persentase perempuan di parlemen tingkat Kota, periode 2019-2024 berjumlah 13 orang, menunjukkan adanya kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan dapat dimaknai sebagai bukti adanya keberdayaan perempuan di semua bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
2. Dalam peraturan Daerah Kota Makassar No.5 tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar memuat adanya program pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan dan sudah tentu dengan persentase anggaran responsive gender pada belanja langsung APBD.

## **SIMPULAN.**

1. Indeks Pembangunan Gender di Kota Makassar mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya pemberdayaan Gender (IDG), yang terlihat dari beberapa aspek yakni meningkatnya perempuan dalam peran disektor politik, professional perempuan dalam hal pengambilan keputusan dan distribusi/sumbangan pendapatan gender.
2. Ketimpangan Gender yang terjadi sebagai akibat ketidakadilan terhadap perempuan terdapat angka; 0.188, akan

tetapi dibanding tahun sebelumnya dengan angka; 0.198 yang berarti ada pengurangan ketimpangan yang ditandai dengan keberhasilan dalam penanganan KDRT melalui program “shelter warga” dimulai sejak tahun 2016 .

3. Dalam rangka Pengarusutamaan gender, masih diperlukan sumber daya yang lebih besar, terutama alokasi anggaran untuk sosialisasi program *Shelter* warga untuk menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga dapat mengatasi Kesenjangan gender dan untuk pelembagaan PUG di berbagai bidang pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Gunarsa, Singgih D, dkk, (2011), *Perkembangan anak dan Remaja*, Penerbit Libri Jakarta
- Kemenag RI, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, dicetak Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta
- Kumorotomo Wahyudi; (2011) *Etika Administrasi Negara*, Penerbit Raja Grafindo Persada. Tapos Kota Depok
- Mansoer Faqih, (2008) *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. , Pustaka Pelajar
- Muzayyadah Dini Iklilah, dkk (2020), *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Mulawarman, dkk, (2022), *Profil DPRD Kota Makassar, Kiprah dan Pemikiran*, Penerbit Humas DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.
- Subarsono, AG, 2011, *Analisis kebijakan Publik, Konsep, Teori dan aplikasi*, Penerbit, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugandi, Yogi Suprayogi, (2011), *Administrasi Publik, Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*, penerbit Graha Ilmu .Medan
- Suriastini, Ni Wayan, 2013, *Satu langkah menuju Impian Lanjut Usia, Kota Ramah Lanjut Usia 2030 Kota Makassar*, penerbit Survey Meter, Yogyakarta .

Shihab, M.Quraish, 2011; Perempuan, Penerbit Lentera Hati, Tangerang.

Thabrani Hasbullah, (2015), Jaminan Kesehatan Nasional, Penerbit PT. Raja Grafindo

Winarno Budi, (2011) Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus, Penerbit CAPS. Yogyakarta

### **Jurnal /Skripsi:**

Annisa yudha, Nurul Andi , (2021) Fungsi Shelter Warga Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kelurahan Tamamaung Kota Makassar, (Skripsi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNHAS)

Gusmansyah, Wery, Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia (Jurnal Hawa Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019)

Indra Kusumawardhana & Rusdi J. Abbas, 2018, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, Universitas Pertamina, Jurnal Ham Vol. 9 No. 2, Desember 2018.

Janu, Arbain, dkk, 2015, Pemikiran Gender Para ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih (Jurnal Sawwa Volume 11 Nomor 1, Oktober 2015) .

Nain, Umar, 2021, Pelaksanaan Program Posyandu dan Prilaku hidup sehat Ibu dan anak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta , (Jurnal Pallangga Praja (JPP) Kampus Sulsel, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021.)

Ita purmalasari, dkk, Efektivitas Kebijakan Walikota Makassar Dalam Program Pencegahan Kekerasan Anak Berbasis

Shelter Warga; Indonesia; Journal of Criminal Low. UNHAS, Vol.3 No.1 Juni 2021

Rahayu, Ninik, 2012, Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia (*Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation*) Jounal Legislasi Indonesia Vol.9 No.1 april 2012

Silaban, Ahmad H. 2015, Implementasi Politik Perempuan di Kota Makassar, Jurnal The Politics, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1 nomor 1 Januari 2015.

### **Dokumen/Peraturan Perundang Undangan**

Peraturan presiden RI No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2020-2024.

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kota Makassar No.5 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 Kota Makassar.

Peraturan Daerah No.5 tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kota Makassar.

### **Internet**

<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab1.html>

<https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/24>